

Ariel Heryanto

Berita, Cerita dan Derita*

Belakangan, saya semakin meragukan perlunya sastra diajarkan di sekolah. Yang saya sebut 'sastra' adalah seperti yang kini telah biasa kita kenal. Yang saya sebut 'sekolah' meliputi sekolah dasar, sekolah lanjutan, sampai sekolah tinggi, yang dibangun dengan biaya tidak kecil dan sebagian diambil dari uang rakyat. Keraguan ini bersumber dari kecurigaan saya terhadap tingkah polah baik 'persekolahan' maupun 'persasteraan' dalam kehidupan sosial kita.

* * *

Pengajaran 'sastra' pada prakteknya merupakan pemasyarakatan serangkaian anggapan yang lama-lama jadi keyakinan yang disahkan: (1) sastra *perlu* dipelajari semua orang, walau tak semua orang mampu atau mau; (2) tak semua orang mengerti seluk-beluk sastra; (3) ada beberapa orang yang dianggap tahu dan mengerti seluk-beluk sastra, serta mau dan mampu mengajarkan sastra kepada orang lain . . . tidak secara gratisan! Maka pengajaran sastra pun masuk sekolah.

Walau dianggap kuno oleh beberapa teman, gagasan Ivan Illich tentang sekolah menurut hemat saya masih tetap penting buat kita di sini masa kini. Illich berpendapat di mana-mana banyak orang berpikir keliru: dikiranya problem pendidikan adalah kurangnya tenaga guru yang baik, kurangnya sekolah atau fasilitas belajar, atau dana. Padahal, begitu Illich, problemnya ialah banyak orang sudah terkecoh dan tergila-gila pada sekolah; mereka menganggap sekolah itu mutlak penting dan berjasa bagi rakyat banyak. Menurut Illich, orang sudah mengacaukan 'pendidikan' dan 'sekolah' (lebih jauh lagi Illich membandingkan kacaunya pengertian orang Nasrani di Eropa waktu lampau tentang 'penyelamatan' dan 'gereja' dan saya kira kehidupan sastra kita tak merdeka dari manipulasi bahasa sejenis, seperti yang akan saya bahas di bawah ini nanti). Dalam tuduhan Illich, yang bukan tanpa alasan, sekolah telah menjadi alat yang dikuasai orang kaya dan orang berkuasa untuk memperbesar kekayaan dan kekuasaan mereka. Jelas kita butuh pendidikan, tapi bukan sekolah, Illich memperingatkan.

Untuk mempertahankan monopoli pasaran dan merek dagangnya, orang sekolahan perlu berupaya macam-macam. Salah satunya yang penting: mempertahankan sumber produksi sastra dan gagasan tentang sastra. Walau mereka mungkin sudah mengakui diam-diam bahwa sastra bisa tumbuh dan

* Berasal dari "Temu Redaktur Kebudayaan se Jawa dan Temu Sastrawan se Jawa Tengah 1984" di UNDIP Semarang.

hidup di segala lapisan masyarakat, mereka tak bergegas gambar-gembar soal ini. Sebab itu bisa mengancam sumber rupiah dan gengsi mereka. Diupayakan segala macam siasat agar masyarakat, suka atau tidak suka, hanya mengenal, mengakui dan mengagungkan sastra milik orang sekolahan yang telah dicetak berbuku-buku dan dibahas di kelas.

Di sekolah juga dibuat dan diedarkan macam-macam teori dan istilah untuk membicarakan sastra. Dan semua itu dibuat dengan ongkos yang tidak kecil. Tak peduli apakah istilah itu srobotan dari negeri asing atau buatan para elit dalam negeri. Karena tidak semua orang mampu buang waktu dan uang untuk menjadi warga orang-orang sekolahan, maka tak semua orang bisa ikut bicara perihal sastra dalam bahasa/istilah-istilah dan teori-teori yang disahkan.

Dendang abang becak di waktu istirahat siang, atau seorang babu yang lagi mencuci seragam Korpri sang juragan di kamar mandi bisa-bisa saja dianggap 'sastra'. Tapi orang-orang macam begitu tak punya tempat dalam sarasehan/diskusi/seminar/ceramah/temu sastra kita. Ada banyak sebabnya, tapi yang utama: mereka tak punya bahasa yang sudah disahkan sebagai bahasa kesatuan warga masyarakat sastra Indonesia. Tentu mereka pun sebenarnya tak peduli atau merasa rugi jika tidak dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan macam itu. Juga jika dendang mereka tak digolongkan sebagai 'sastra' oleh orang-orang sekolahan yang berwenang. Juga jika ungkapan-ungkapan mereka itu tak menjadi bagian dalam bahan-bahan bacaan wajib para pelajar di kelas sastra, dan tak dimasukkan dalam antologi sastra Indonesia.

Maka, di atas segala upaya memproduksi bahasa/istilah atau teori kesusasteraan untuk membentengi diri dari demokratisasi bersastra, orang sekolahan perlu bekerja sama dengan berbagai pihak dari kelas menengah dan atas dalam masyarakat untuk melestarikan batasan pengertian 'sastra' yang dapat dimonopoli dan diterima secara sah oleh orang banyak. Inilah biang dari segala persoalan yang lain dalam kesusasteraan kita. Batasan 'apa itu sastra' dan 'apa yang bukan sastra' menentukan apa yang perlu dibayar dengan anggaran yang dipungut dari kantong orang banyak, apa-apa yang perlu dihapal dan disanjung-sanjung anak sekolah. Ini juga menentukan siapa yang secara sah dapat dianggap berwenang, pantas, dan patut mengajar kesusasteraan, dan siapa yang diwajibkan perlu diajar.

Tanpa usaha pengetatan begitu, batasan 'sastra' bisa longgar. Dan jika teramat longgar bisa ikut menjadi milik rakyat banyak. Jika ini terjadi, harga bandrol sastra, uang sekolah, gaji guru sastra, atau honorarium sastrawan jadi berantakan.

* * *

Pengajaran (juga diskusi/penataran/seminar dll.) sastra biasanya diajarkan dengan bahasa iklan nomor wahid. Kadang-kadang bulu kuduk bisa pingin berdiri, jika saya amati rumusan alasan dan sasaran diadakannya peng-

ajaran sastra di banyak sekolah. Di situ biasanya disebut-sebut barang-barang keramat seperti: kepekaan intelektual dan estetik, pengembangan kepribadian, nilai-nilai kemanusiaan, atau yang belakangan sedang ngepop: manusia seutuhnya.

Membaca rumusan-rumusan demikian, kita mendapat kesan seakan-akan yang dinamakan sastra itu sedemikian agung dan mulia, sehingga cuma sabda dewa dan ayat suci agama yang bisa menandinginya. Sedang yang dinamakan sastrawan juga dikesankan berlebih-lebihan tak kepalang tanggung. Untuk lebih menganger-angerkan, kadang-kadang sastra dipertentangkan dengan ilmu, atau politik. Dan jelas sastra diagung-agungkan dalam perbandingan demikian.

Saya percaya para pengajar maupun pelajar kita sama-sama tahu betapa muluk-muluknya rumusan-rumusan demikian. Saya juga yakin para pengajar dan pelajar kesusasteraan kita sama-sama tahu betapa jauh jarak antara target yang dilambungkan rumus-rumus demikian dan hasil nyata pengajaran kesusasteraan di akhir program pengajaran, misalnya di akhir semester atau bahkan ketika si pelajar lulus sekolah dan menggondol gelar.

Nampaknya rumusan-rumusan alasan dan sasaran pengajaran muluk-muluk itu tidak dibuat dengan sikap bersungguh-sungguh. Entah guyonan entah kemunafikan, yang jelas bukan banyolan. Barangkali sekedar kelatahan; para perumus pengajaran itu menyusun rancangan pelajaran dengan modal apa yang pernah diberikan bekas guru-guru mereka, dan bekas guru-guru itu juga meniru bekas guru-guru mereka sendiri. Kalau benar demikian, siapa yang memulai, kapan, mengapa?

Kemungkinan sebab yang lain: ada suatu kekuatan yang mendesak para penyelenggara pengajaran sastra kita untuk mengulang-ulang rumusan muluk-muluk demikian. Rumus-rumus demikian seakan-akan seperti asas tunggal kesusasteraan yang mesti dipatuhi siapa saja yang mau menjadi warga masyarakat sastra kita. Atau seperti mantera simsalabim yang perlu disebut untuk membuka pintu kas dana serta perijinan dari yang berwenang agar penyelenggaraan perbincangan sastra dapat diadakan secara sah. Bahkan mungkin untuk lebih mempermudah penyelenggaraan kegiatan bersastra itu, kata 'pancasila' disebut di sela-sela rumusan-rumusan itu.

Saya gembira, forum ini dirancang panitia penyelenggara sebagai forum "untuk menguji konsep-konsep kesusasteraan di Indonesia". Maksudnya agar konsep-konsep itu "diluruskan jika ada kemungkinan bergeser dari tujuan utamanya". Saya yakin dalam perkara ini panitia punya sikap bersungguh-sungguh. Bukan guyonan atau sungguh-sungguh guyonan.

Tapi tadi dibilang "kemungkinan bergeser dari tujuan utamanya". Apa tujuan utama itu sendiri? Menurut panitia "meningkatkan kualitas manusia melalui alternatif-alternatif yang disodorkan dalam karya sastra". Bagus! Tapi soal berikutnya (atau sebelumnya): kalau kita sebut-sebut "sastra", apa sih yang bersliweran dalam pikiran kita?

* * *

Istilah (dan dengan sendirinya juga pengertiannya) 'sastra' punya riwayat panjang di bumi Nusantara. Paling tidak seribu tahun. Dan selama masa itu istilah 'sastra' tak pernah beku, statis lestari. Pengertian 'sastra' selalu dalam proses perubahan dari waktu ke waktu, sesuai dengan perubahan selera, kepentingan dan siasat pemegang kekuasaan dalam masyarakat.

Kini, salah satu pengertian terkuat untuk 'sastra' berupa kategori untuk karya (tidak selalu, tetapi hampir selalu) tertulis yang dibilang prosa, puisi, dan drama (atau kombinasi di antaranya). Mendengar kata 'sastra' orang berpikir tentang novel/roman, cerpen, cerber, pantun, sajak, sandiwara, dsb. Tegasnya, kata 'sastra' digunakan untuk menerjemahkan pengertian kata *literature* dalam bahasa Inggris. Jika secara karikatural diibaratkan sebagai orang, maka 'sastra' masa kini pada dasarnya berjiwa Eropa/Amerika Serikat, walau berdaging Sansekerta India dan bertingkah, berpakaian atau bergincu Nusantara (atau Jawa, Minang, Sunda, Bali dsb.).

Puisi boleh-boleh saja dibuat berbau Jawa, tetapi pertama-tama dia adalah puisi (yang bertanah air di belahan bumi sebelah sana) sebelum dia diberi bau Jawa. Novel bisa-bisa saja berwarna Minang, tetapi ia tetap novel (dan bukan hikayat, misalnya) yang belum tentu memasyarakat dalam lingkungan hidup orang-orang Minang di suatu masa. Dan seterusnya.

Apa yang asing tidak selalu jelek, atau jahat, atau merugikan yang pribumi. Tidak mustahil jika ada sesuatu yang berasal dari negeri asing justru lebih baik dan menguntungkan sebagian besar kehidupan pribumi, daripada yang pribumi sendiri. Berdirinya republik kita ini, misalnya, sedikit atau banyak juga telah dimungkinkan berkat adanya beberapa buah pikiran orang-orang asing. Dan sejauh saya tahu, belum ada warga republik ini yang menyesalkan berdirinya republik kita.

Lalu sastra termasuk yang bagaimana?

Jika pengertian (bukan sekedar ciri-ciri) 'sastra' adalah ungkapan verbal manusia yang mampu "meningkatkan kualitas manusia melalui alternatif-alternatif . . ." maka tentu saja sastra termasuk yang baik dan perlu untuk warga masyarakat kita. Tapi soalnya apakah ungkapan verbal yang "meningkatkan kualitas manusia melalui alternatif-alternatif . . ." itu cuma prosa, puisi, dan drama (atau kombinasi di antaranya)? Dan apakah setiap prosa, puisi, dan drama (atau kombinasinya) selalu "meningkatkan kualitas manusia melalui alternatif-alternatif . . ."? Untuk kedua pertanyaan itu saya cenderung menjawab "tidak".

Jika pengajaran sastra sungguh-sungguh diharapkan menjadi kegiatan belajar-mengajar seluk-beluk ungkapan verbal yang dianggap mampu meningkatkan kualitas manusia melalui alternatif-alternatif yang terkandung di dalamnya, maka *tidak lagi bisa dibenarkan* jika bahan-bahan bahasan dalam kegiatan itu hanya dibatasi pada karya-karya tulis yang selama ini dikategorikan sebagai prosa, puisi, drama, atau kombinasi di antaranya. Bukan cuma *dapat*, tetapi *perlu* dipertimbangkan pula bahan-bahan lisan atau tertulis yang selama ini dikategorikan 'ilmiah', atau 'politis', atau bahkan yang selama ini

dianggap belum cukup pantas untuk dimasukkan di salah satu kategori penting dalam sekolah. Konkritnya, uraian orang-orang pinter perihal ekonomi, lingkungan hidup, keluarga dll. tak dapat diabaikan. Juga beberapa pidato negarawan penting, atau ungkapan uneg-uneg protes warga rakyat kelas bawah yang disebarakan lewat kolom-kolom "surat pembaca".

Dengan demikian, saya mengharapkan dipertimbangkannya kembali batasan yang memisahkan 'sastra' dan 'bukan sastra'. Yakni batasan yang menentukan apa-apa yang mesti diajarkan kepada para pelajar dikelas sastra. Yang juga menentukan apa yang dapat dan apa yang tak dapat dimuat dalam rubrik "sastra" dalam koran-koran dan majalah. Berbeda dengan beberapa rekan pecinta 'sastra' di tanah air, saya gembira karena harian *Kompas* tidak membuka rubrik 'sastra' secara khusus, dan majalah *Basis* juga tidak menyempitkan diri menjadi majalah 'sastra'. Bertolak dari pikiran serupa, saya meragukan perlunya pemisahan pembicara dan pembicaraan dalam pertemuan di sini menjadi panel 'sastrawan' dan panel-panel 'bukan sastrawan'.

Sejauh pengamatan saya, walau ada tetapi sangat sedikit betul para pengamat kesusasteraan kita yang mengungkit-ungkit dominasi batasan 'sastra' dan 'bukan sastra' yang kini melanda di sekitar lingkungan kita. Mungkin ada banyak sebabnya, dan saya tak berniat menyederhanakannya. Namun, menurut pengamatan saya ada beberapa hal yang ikut menyebabkan hal itu. Pertama, masih kuatnya anggapan bahwa hal-hal yang tidak langsung berurusan dengan prosa, puisi atau drama dinilai berada di luar wilayah studi kesusasteraan, dan dianggap sudah ada spesialis-spesialis lain yang dianggap lebih berwenang mempersoalkannya. Lebih parah lagi, masih adanya keyakinan beberapa pecinta fanatik kesusasteraan yang beranggapan bahwa dengan 'sastra' (dengan pengertian prosa, puisi, dan drama) kita akan *lebih* mampu menghayati atau bahkan menyelamatkan nilai-nilai kemanusiaan *daripada* berurusan dengan ungkapan verbal yang tidak tergolong 'sastra' (prosa, puisi, atau drama). Di samping semua itu, banyak studi sastra kita telah kelewat repot dengan teori-teori abstrak yang kurang menyentuh persoalan derita dan bahagia banyak orang dalam kehidupan sehari-hari yang konkrit. Lebih repot mencocok-cocokkan pedoman dan teori-teori asing dengan karya sastra (prosa, puisi, atau drama) pribumi daripada mempersoalkan kekuatan dalam aneka ungkapan verbal manusia yang mampu "meningkatkan kualitas manusia melalui alternatif-alternatif . . ."

* * *

Eratnya hubungan antara sastra dan media massa, khususnya koran di Indonesia sudah banyak dibahas orang. Belakangan hal itu diulas kembali dengan bagus oleh Sapardi Djoko Damono dalam Simposium Nasional Sastra Modern Indonesia di Yogyakarta dan oleh Bambang Sadono SY dalam *Minggu Ini* di Semarang. Hubungan sastra dan koran biasanya ditunjukkan dalam dua hal. Pertama, hubungan itu ditunjukkan pada kerja sama sastra (moderen) dan koran pada masa keduanya sama-sama baru terlahir. Kedua, biasanya diungkapkan betapa besar jasa koran dalam proses pertumbuhan

sastra pada waktu-waktu selanjutnya. Dibandingkan dengan yang kedua, tak begitu banyak orang yang mempersoalkan soal yang pertama. Tentang yang kedua, orang sastra masih tak henti-hentinya merengek, merayu, atau menodong orang-orang koran agar disediakan lebih banyak kolom dan halaman koran yang menyediakan rubrik sastra. Saya kira masih banyak persoalan lain tentang hubungan sastra dan koran yang masih belum cukup mendapat perhatian.

Tentang sastra (moderen) Indonesia di awal pertumbuhannya, Sapardi mencatat bahwa pada masa itu "berita dan cerita tidak begitu jauh, hanya selangkah saja." Sapardi tidak cuma bermaksud menunjukkan bahwa beda dua kata itu ditandai beda dua huruf pertama yang "hanya selangkah saja" dalam barisan abjad. Sapardi ingin menegaskan bahwa 'cerita' dan 'berita' sama-sama lahir dan bertumbuh di koran, ditulis oleh wartawan, berdasarkan kejadian nyata, dan dibaca pembaca koran.

Pernyataan Sapardi itu tidak saja mengingatkan kita bahwa istilah (dan dengan sendirinya pengertian) 'sastra' yang kini biasa kita pakai belum lagi memasyarakat di sekitar masa pergantian abad yang lalu. Catatan yang dibuat Sapardi juga mengingatkan kita akan perbedaan watak 'sastra' (yang disebut 'cerita' pada) tempo doeloe itu dengan apa yang kita miliki sekarang. Waktu itu 'cerita' relatif dekat berurusan dengan persoalan-persoalan kehidupan yang nyata ketimbang dengan teori-teori keindahan, atau kesenian yang dibikin orang-orang sekolahan.

Walau saya (sebagai produk pertengahan kedua abad ini) lebih tertarik pada 'cerita'-cerita' tempo doeloe itu daripada kebanyakan karya 'sastra' mutakhir Indonesia, saya tak berniat mengusulkan agar sastra kita dibawa mundur seratus tahun ke belakang. Menyongsong tahun-tahun mendatang saya lebih suka berharap adanya kesempatan bagi pengembangan konsep 'sastra' yang lebih terbuka. Termasuk pengakuan dan pengkajian peran koran secara lebih baik dalam upaya menyusun, menerbitkan, dan mempelajari tulisan-tulisan yang dapat "meningkatkan kualitas manusia melalui alternatif-alternatif . . ."

Kekuatan sosial 'koran' di Indonesia saat ini sudah terbilang besar. Apalagi jika dibandingkan dengan 'sastra' (prosa, puisi, drama) moderen. Sejak di awal kelahiran dan seterusnya selama pertumbuhan bangsa ini, sumbangan atau jasa 'koran' selalu mengungguli sumbangan apa yang kini biasa kita sebut 'sastra' (itu pun kalau memang dipercaya ada 'sumbangan' yang pernah diberikan 'sastra' kita). Lucunya, masih banyak di antara pengamat sastra kita yang menyepelkan 'koran' di depan 'sastra' dengan pernyataan-pernyataan " . . . *masih* sastra koran, *belum* sastra buku".

Salah satu sumber kekuatan koran dalam masyarakat kita, saya kira, adalah justru karena 'bahasa' koran tidak seperti 'bahasa' buku. Bahasa koran cocok sekali untuk masyarakat kita yang pada umumnya masih lebih banyak berorientasi pada kebudayaan lisan daripada tulisan. Benar, 'bahasa' koran juga tertulis, tidak terucap. Tetapi bahasa tertulis koran tidak sama dengan bahasa tertulis buku, seperti yang sudah dijelaskan Marshal McLuhan

dua puluh tahun yang lampau. Jika dirasa perlu, bahasan lebih lanjut tentang hal ini bisa diadakan di luar catatan ini mengingat terbatasnya ruang di sini.

Dengan menyebut-nyebut keunggulan koran di atas tidak berarti saya sudah yakin betul bahwa koran-koran kita sanggup menikmati apa yang mereka cita-citakan sendiri. Saya belum yakin betul bahwa dengan berita dan cerita koran sudah sanggup menjadi juru selamat bagi kaum yang hidup dalam derita. Saya tidak yakin koran selalu mampu bertahan terhadap tekanan-tekanan dan ancaman (dari luar atau dalam kubu sendiri) sewaktu berupaya mewujudkan apa yang dicita-citakannya. Tapi paling tidak koran punya bakat untuk menjadi kekuatan yang besar dalam perubahan sosial.

* * *

Pengajaran sastra tak lagi perlu ikut-ikutan orang-orang sastra yang meremehkan koran. Sumbangan koran bagi 'sastra' tidak hanya sebatas pemuatan cerpen, cerber, sajak, berita pertemuan, sayembara, atau penerbitan karya sastra, jika apa yang kita maksud dengan 'sastra' tidak sekedar prosa, puisi, dan drama.

Dengan demikian saya ingin menghindarkan kesan seakan-akan saya anti sekolah, yang mungkin muncul dari kalimat-kalimat di awal catatan ini. Sedang pepatah pun sudah mengingatkan bahwa kita butuh (bekas) maling untuk menangkap maling. Illich sendiri menunjukkan bahwa sekularisasi agama Kristen justru dimulai oleh orang-orang dalam gereja sendiri. Tanpa pernah bersekolah, saya kira saya tak bakal mampu menulis catatan yang 'mendurhaka' persekolahan seperti ini.

uksw, des '84